



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan *Gender Diversity* Terhadap *Fee Audit*

Rina Yuniarti^{*1}, Pedi Riswandi² dan Meilaty Finthasari³

¹Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Departement Accounting, Faculty Economic, email: rinayuniarti@umb.ac.id

²Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Departement Accounting, Faculty Economic, email: pedi.riswandi@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Department Management, Faculty Economic, email: mheyfinta@umb.ac.id

Corresponding author: rinayuniarti@umb.ac.id

Abstrak

Audit fee merupakan kompensasi yang didapatkan akuntan publik dari perusahaan atas jasa audit yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koneksi politik dan gender mempengaruhi besarnya biaya audit yang diberikan perusahaan kepada akuntan publik. Data sekunder yang digunakan berbentuk laporan tahunan perusahaan yang go public pada periode 2015-2018. Sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah data sebanyak 865 perusahaan. Sedangkan variabel atau atribut penelitian diantaranya fee audit digunakan untuk variabel terikat, serta hubungan politik dan gender CEO dipergunakan sebagai variabel bebasnya. Untuk analisis data menggunakan pendekatan regresi linier berganda melalui penggunaan uji asumsi klasik. Hasilnya, hubungan politik dapat meningkatkan biaya audit dan gender CEO tidak signifikan terhadap biaya audit. Batasannya adalah pengungkapan biaya audit dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela, yang berakibat pada masih banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Variabel yang digunakan dibatasi pada jenis kelamin direksi CEO tanpa melibatkan jenis kelamin dewan komisaris dan komite audit.

Kata kunci: hubungan politik, keragaman gender, biaya audit

Abstract

The audit fee is the compensation received by the public accountant from the company for the audit services provided. This study aims to determine whether political and gender connections affect the amount of audit fees that companies give to public accountants. The secondary data used is in the form of annual reports of companies that went public in the 2015-2018 period. The sampling used is purposive sampling with a total data of 865 companies. Meanwhile, research variables or attributes, including audit fees, are used for the dependent variable, and political relations and CEO gender are used as independent variables. For data analysis using multiple linear regression approach through the use of classical assumption test. As a result, political relations can increase audit fees and CEO gender is not significant to audit fees. The limitation is that the disclosure of audit fees in the annual report is still voluntary, which results in many companies that do not meet the sample criteria. The variables used are limited to the gender of the CEO directors without involving the gender of the board of commissioners and the audit committee.

Keywords: *political connection, gender diversity, audit fees*

1. Pendahuluan

Profesi akuntan publik salah satu profesi yang dipercaya oleh publik dapat memberikan rasa keyakinan dan kepercayaan bagi pemilik perusahaan terkait pemberian opini audit atas laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat bagi pihak intern atau pihak ekstern, sehingga perlu dilakukan audit oleh akuntan publik independen [1]. Sorang auditor mempunyai kapasitas untuk dapat mengetahui parameter yang digunakan, karena laporan keuangan tidak berguna jika akuntan publik tidak independen dalam pengumpulan serta evaluasi bukti [2]. *Fee audit* merupakan satu dari beberapa aspek yang dapat mengakibatkan kualitas pelaksanaan audit dapat berkurang. *Fee audit* adalah imbalan dari penerima jasa kepada akuntan publik atas jasa audit yang didapatkan. Pedoman pembayaran *fee audit* sudah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), tetapi kenyataannya biaya audit yang dibayarkan perusahaan bervariasi. Kondisi ini dilakukan secara subjektif oleh perusahaan, hal ini disebabkan karena bergantung pada kemampuan dan penawaran diantara perusahaan dan auditor independen. Tinggi atau rendahnya besarnya *fee audit* dari jasa audit yang didapatkan perusahaan oleh auditor independen berkaitan erat dengan kemampuan tawar menawar yang dilakukan diantara klien dan auditor [3]. Terdapat dua kategori yang dapat mempengaruhi besaran biaya audit, diantaranya atribut klien serta atribut auditor [4]. Untuk atribut klien berupa ukuran, kompleksitas, risiko dan daya laba dari *auditee*. Sedangkan untuk atribut auditor berupa ukuran KAP, reputasi, pengalaman, spesialisasi industri serta kompetensi KAP.

International Forum of Independent Auditor Regulators (IFIAR) melakukan survey yang menyimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan audit saat ini masih tergolong rendah, dikarenakan perang harga dalam menentukan besaran imbalan jasa audit terkait dengan tata kelola Profesi Akuntan Publik [5]. Kekuatan tawar menawar antara klien dengan auditor sangat penting untuk menentukan besar kecilnya *fee audit* yang harus dibayar ditengah persaingan sesama akuntan publik. Prosedur dalam menentukan biaya audit oleh Kantor Akuntan Publik merupakan satu diantara faktor penting dalam review kualitas dan mutu terhadap Kantor Akuntan Publik sehingga menarik untuk diteliti. Auditor perlu melakukan penilaian risiko sebelum auditor melakukan prosedur audit [6]. Semakin tinggi risiko audit semakin tinggi pula upaya audit untuk memberikan opini audit yang sesuai disesuaikan dengan jumlah *fee audit* yang sudah disepakati bersama [7]. Jenis risiko yang melekat pada perusahaan adalah risiko *inherent*, merupakan risiko yang dinilai oleh auditor sebelum mempertimbangkan efektifitas pengendalian internal perusahaan [8]. Perusahaan yang memiliki koneksi politik maka risiko *inherent* tinggi [9]. Hal disebabkan karena koneksi politik dinilai dapat meningkatkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Koneksi politik kerap terjadi di negara-negara yang berkembang, tidak terkecuali negara Indonesia. Koneksi politik terjalin dengan memasukkan orang atau pihak-pihak yang mempunyai keterdekatan dengan pemerintah, dengan ini perusahaan mempunyai ikatan ataupun hubungan dengan pemerintah, lewat komisaris, direksi atau sekretaris perusahaan [10]. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, pernah dilakukan pengisian atau penggantian komisaris BUMN dari simpatisan ataupun anggota partai politik menjadi pejabat atau duduk sebagai komisaris BUMN [11]. Perusahaan yang memiliki koneksi politik diberikan kemudahan akses untuk memperoleh pinjaman, rendahnya pajak serta kemampuan pasar yang lebih kokoh [12].

Struktur manajerial perusahaan meliputi *gender*, ukuran dan pengasaan saham. Perbedaan antar individual karena *gender* dan etnitas cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan. Pemimpin perempuan yang menduduki sebagai pimpinan sebuah perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan yang drastis berada pada urutan atas di tingkat Asia Pasifik. Hasil *survey global* dari 5.500 perusahaan di 36 negara, sebanyak 46% perempuan memiliki keberhasilan pada

pucuk senior kepemimpinan, ini mengalami kenaikan dari 36% pada tahun 2016 [13]. Karena mengalami tekanan sosial agar dapat dipertahankan kepemimpinan mereka, CEO dan eksekutif wanita memiliki kecenderungan dalam preferensi jaminan yang lebih baik (handal dalam melaporkan keuangan) dan pembuatan laporan audit yang *on time* atau tepat waktu terkait dengan kualitas pelaporan dan reputasi bagi CEO [14]. Auditor menilai CEO perempuan memiliki risiko yang kurang *inherent* terkait salah saji material atas laporan keuangan sehingga auditor bersedia mengurangi ruang lingkungannya dan berdampak pada biaya audit yang rendah [15].

Penelitian terdahulu seperti uraian sebelumnya telah berhasil memperlihatkan bahwa ada pengaruhnya koneksi politik dan *gender* CEO terhadap *fee audit*. Beberapa penelitian lain justru menemukan hasil yang berbeda, seperti Srinindi dan Tianyi (2010), menemukan bahwasanya perusahaan yang tekoneks dengan politik tidak memiliki pengaruh terhadap *fee audit*. Xiang [16] dan Bosma [17], mengungkapkan bahwa *gender* CEO tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya manajer perempuan yang memimpin sebuah perusahaan mempunyai beban *fee audit* yang tidak berbeda dengan *fee audit* yang dikenakan oleh manajer laki-laki sebagai pimpinan. Selain itu penelitian sebelumnya terkait tingginya *fee audit* pada perusahaan dengan koneksi politik menimbulkan pertanyaan apakah kenaikan *fee* murni dikarenakan tingginya risiko perusahaan atau adanya *factor rent-seeking* yang dilakukan auditor yang dijelaskan dalam salah satu keterbatasan penelitian Gul (2006) [18].

Hubungan agensi antara pihak *principal* dengan *agent* tidak dapat dipisahkan dari lingkungan bisnis. Hubungan agensi ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik diantara *principal* dan *agent* yang mempunyai keinginan yang berbeda terhadap perusahaan. Konflik tersebut dapat berkurang jika melibatkan pihak ketiga dalam melakukan prosedur audit [19]. *Fee audit* menarik untuk diteliti mengingat banyak persaingan antara akuntan publik yang semakin bertambah dan berlomba-lomba memberikan besaran jasa audit dengan harga bervariasi. Audit Fee merupakan kasus yang dilematis, karena auditor dituntut memiliki sikap objektif dan independensi yang tinggi dalam melaksanakan tugas audit. Namun di sisi lain, akuntan publik harus mendapatkan *Fee*. Topik audit *Fee* menarik untuk dipelajari mengingat semakin ketatnya persaingan antara akuntan publik dan para auditor dalam menawarkan jasa audit dengan harga yang bervariasi. Dari pemaparan diatas berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan terdapat perbedaan hasil. Maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait apakah koneksi politik dan *gender diversity* memiliki pengaruh terhadap audit *fee*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *go public* karena dapat memberikan gambaran kondisi menyeluruh untuk perusahaan yang berada di Indonesia. Data tersebut bersumber pada *annual report* perusahaan *go public* tahun 2015-2018 dengan sampel sebanyak 865 perusahaan. Riset ini memiliki tujuan agar dapat diperoleh bukti secara empiris pengaruh koneksi politik dan *gender* CEO terhadap *fee audit*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi auditor saat mendapatkan tugas audit sehingga auditor menerima *fee audit* dengan profesional dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesa

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Agency Theory

Agency theory menggambarkan keterkaitan diantara pihak *principal* dengan pihak *agent* sebagai hubungan yang muncul dikarenakan terdapat kontrak yang disepakati antara kedua pihak agar dapat terlaksananya tugas yang menjadi perhatian pihak *principal*. Pihak *principal* sebagai pemilik perusahaan sedangkan pihak *agent* sebagai manajemen perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan. Hubungan agensi antara kedua belah pihak tidak

menutup kemungkinan akan terjadinya konflik kepentingan masing-masing [19]. Teori ini berfokus pada penentuan kontrak yang lebih memiliki nilai efisiensi dalam mengatur hubungan *principal-agent* terhadap asumsi tentang sikap seseorang diantaranya kepentingan individu, batasan rasional, menghindarkan risiko, menghindari konflik kepentingan, serta komoditas informasi [20].

Teori keagenan memiliki prinsip utama yaitu terdapat hubungan kerja diantara bagian yang menyerahkan wewenang (*principal*) yakni *stakeholder* dengan bagian yang mendapatkan wewenang (*agent*) yakni pimpinan. Teori ini berdasarkan dari 2 (dua) masalah utama, yaitu: 1) Kaitan diantara *principal* dan *agent* yang kerap menghasilkan *information asymmetry* diantara keduanya; 2) Adanya *conflict of interest* atau konflik antar kepentingan yang dialami oleh *principal* dan *agent*, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara kedua belah pihak [21]. Inti dari teori *principal-agent* adalah terdapat pada *trade-off* antara biaya yang digunakan dalam pengukuran perilaku serta biaya digunakan sebagai alat ukur hasil dan pemindahan risiko pada *agent* [22].

Perlu adanya pengawasan dan pengendalian perusahaan agar dapat dipastikan pengelolaan dilaksanakan dengan asas kepatuhan terhadap aturan serta ketentuan yang ada. Usaha dalam mengawasi aktivitas ini memunculkan pengawasan ini menimbulkan *agency cost* atau biaya agen. *Agency cost* dapat diartikan sebagai biaya ataupun risiko yang didapatkan jika *principal* membayarkan biaya pada *agent* agar dapat melaksanakan tugasnya, akan tetapi keinginan *agent* tidak selalu sama dengan keinginan *principal* [19].

2.2 Pengembangan Hipotesa

2.2.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Fee audit*

Sebuah perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang memiliki cara-cara tersendiri untuk menjalin hubungan secara politik atau segala upaya untuk mendekati pada pemerintahan ataupun politisi. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika perusahaan memiliki koneksi politik, satu diantaranya adalah kemudahan akses dalam pembiayaan hutang, pajak rendah, dan kemampuan pasar yang lebih baik [23]. Apabila seorang auditor melakukan penetapan *engagement risk* yang tinggi, mengakibatkan auditor harus menghadapi dua pilihan tindakan [24]. Tindakan pertama, melakukan penambahan jumlah uji dan dikirimkannya staff yang lebih memiliki pengalaman agar *detection risk* dapat dikurangi. Tindakan yang kedua, akan melakukan penambahan *fee premium* yang timbul akibat *engagement risk*. Dua tindakan tersebut berakibat terhadap naiknya *fee audit* yang *auditee* bayarkan. Akan tetapi perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memiliki risiko yang tinggi, hal ini menyebabkan auditor akan menaikkan *fee audit* [25].

Untuk memahami koneksi politik maka digunakan teori agensi sebagai teori dasarnya. Perusahaan yang terkoneksi dengan politik adalah perusahaan yang memiliki aturan tersendiri dalam hubungannya secara politik dengan pemerintahan ataupun politisi. Berdasarkan penelitian [26], perusahaan dengan CEO yang terkoneksi dengan politik mendapatkan kinerja lebih rendah 37% dibanding dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan politik, apabila dilakukan pengukuran menggunakan *stock return* selama tiga tahun pasca IPO. Hal ini menunjukkan bahwa, apabila semakin besar koneksi politik yang terdapat pada perusahaan maka semakin tinggi *audit fee* yang dibebankan pada perusahaan tersebut [12]. Maka, dapat ditarik sebuah hipotesa yang dapat diajukan, yaitu:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee audit*.

2.2.2 Pengaruh CEO Gender Terhadap Fee audit

Perbedaan signifikan terutama terkait dengan kualitas laporan dan pengambilan keputusan menunjukkan perempuan cenderung meningkatkan keputusan direksi [27][28]. Pemilihan pimpinan dengan *gender* perempuan berdasarkan beberapa alasan, diantaranya perempuan memiliki keuletan dan ketelatenan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tidak hanya itu, direksi perempuan lebih memilih menolak risiko jika dibanding dengan laki-laki. Hal ini menyebabkan direksi perempuan mempunyai inheren yang cenderung lebih sedikit risiko dalam kesalahan menyajikan keuangan, yang berakibat kurangnya ruang lingkup auditor dan *fee* audit yang kecil [15]. Terdapat penelitian [29], menunjukkan bahwa perusahaan dengan CEO perempuan berpengaruh terhadap penghindaran risiko. CEO perempuan lebih kecil kemungkinan untuk percaya diri terhadap pengambilan keputusan dan kecil kemungkinan untuk melakukan pembuatan hutang yang memperburuk kondisi perusahaan [15]. Perusahaan dengan CEO perempuan mempunyai tingkat kehadiran yang lebih baik serta lebih melibatkan dari dengan komite yang membutuhkan pantauan secara insentif [30][18]. Terdapat penelitian [15], menemukan bahwa auditor dapat melihat bahwa perusahaan dengan CEO perempuan memiliki risiko yang kurang *inherent* terkait salah saji material atas laporan keuangan, sehingga auditor bersedia mengurangi ruang lingkungannya dan berdampak pada biaya audit yang rendah. CEO perempuan cenderung untuk menghindari risiko dengan membuat pilihan atau kebijakan yang tidak berisiko tinggi [29]. Perusahaan dengan tata kelola yang baik ditandai dengan terbentuknya anggota dewan yang berbeda [31]. Berlandaskan dari uraian teori diatas, sehingga dapat ditarik sebuah hipotesa yaitu:

H2: *Gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee audit*.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyelesaian kasus ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini melakukan penelitian untuk menemukan pengetahuan dengan digunakannya data berbentuk angka yang digunakan dalam menganalisa setiap keterangan untuk mengetahui suatu fenomena [32].

3.1.1 Definisi dan pengukuran variabel

Fee audit dapat dikatakan sebagai kompensasi berupa sejumlah uang ataupun barang yang didapatkan dari pengguna jasa atau pihak-pihak yang terkait yang digunakan sebagai ikatan antara klien atau pihak lain [33]. Variabel *fee audit* digunakan logaritma natural dari besarnya *fee* audit yang diberikan perusahaan kepada auditor [7].

Koneksi politik dapat terlihat dari ada atau tidak kepemilikan langsung oleh pemerintah dalam perusahaan [34]. Berikut ini merupakan kriteria perusahaan yang memiliki koneksi politik [26] [35]:

1. Minimal 10% dari salah satu pemegang saham merupakan anggota parlemen / anggota militer / menteri / mantan menteri.
2. Terdapat minimal satu *Board of director* memiliki rangkap jabatan yang menduduki jabatan di pemerintahan / militer / mantan pejabat pemerintah / mantan pejabat militer.
3. Minimal salah satu *board of commissioner* memiliki jabatan ganda menduduki jabatan di pemerintahan / memiliki jabatan militer / mantan pejabat pemerintah / mantan pejabat militer
4. Profile dewan komisaris serta direksi perusahaan tersebut adalah mantan atau kepala daerah, anggota/mantan politisi, anggota/ mantan militer, anggota/mantan menteri selama periode penelitian

Perusahaan berkoneksi politik dengan pengukuran menggunakan variabel *dummy*, apabila 1 maka perusahaan mempunyai hubungan dengan politik, sebaliknya apabila 0 maka perusahaan tidak terdapat hubungan dengan politik. *Gender* CEO merupakan perbedaan jenis kelamin dan bukan kodrat Tuhan, secara struktur biologis dan juga terbentuk melalui proses sosial dan kultural [36]. *Gender* adalah jenis kelamin antara pria dan wanita secara biologis [14]. Pengukuran untuk *gender* CEO digunakan variabel *dummy*. Apabila 1, maka perusahaan dengan CEO wanita, sebaliknya apabila 0 perusahaan dengan CEO pria [15].

3.1.2 Prosedur Pengumpulan Data

Data sekunder yang digunakan merupakan data yang bersumber pada *annual report* perusahaan *go public* tahun 2015-2018. Sumber data di peroleh melalui situs Bursa Efek Indonesia yaitu Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan www.idx.co.id.

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel

Kriteria Sampel	2015	2016	2017	2018
Perusahaan go public di BEI	514	528	564	580
Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i>	(30)	(39)	(60)	(75)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan <i>fee audit</i> dalam <i>annual report</i>	(290)	(276)	(266)	(285)
Perusahaan yang memenuhi kriteria	194	213	238	220
Jumlah Sampel keseluruhan		865		

Sumber : data diolah

3.1.3 Teknik Analisis Data

Pada tahapan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Tetapi sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, agar dapat dipastikan bahwa model regresi dapat terhindar dari permasalahan normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas serta autokorelasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif pada variabel variabel *fee audit*, koneksi politik dan *gender* CEO tersaji pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std Dev
<i>Fee Audit</i>	18.84	24.50	21	1.1
PC	0	1	0.25	0.30
CG	0	1	0.11	0.16

Sumber : data diolah, 2019

Variabel *fee audit* memiliki nilai minimal diperoleh hasil 18.84, yang dimiliki PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) di periode 2017 yang membayar *fee audit* sebesar Rp. 152.000.000. Untuk nilai maximal diperoleh hasil 24.50, dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) di periode 2017 yang membayar *fee audit* sebesar Rp. 43.700.000.000. Sedangkan nilai mean sebesar 21 lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi sebesar 1.1 menunjukkan bahwa rentang atau jaran antar data yang satu dengan data yang lain. Variabel koneksi politik, nilai minimum sebesar 0, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Nilai maksimum sebesar 1, menggambarkan perusahaan memiliki koneksi politik. Nilai standar deviasi sebesar 0.30 lebih besar dibandingkan nilai mean sebesar 0.25 menunjukkan bahwa sebaran data dalam penelitian ini bervariasi. Variabel *gender* CEO, nilai terendah adalah 0, menggambarkan bahwa CEO dalam perusahaan adalah laki-laki dan nilai terbesar adalah 1, menggambarkan bahwa CEO adalah perempuan. Nilai standar deviasi sebesar 0.30 lebih besar dibandingkan nilai mean yaitu 0.25, hal ini menunjukkan terdapat variasi penyebaran data penelitian.

Sebelum dilakukan uji terhadap hipotesis, sebaiknya melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Untuk uji asumsi klasik disajikan melalui tabel 3 berikut:

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Keterangan
Uji Normalitas	Data terdistribusi normal
Uji Multikolonieritas	Data bebas dari multikolinearitas
Uji Heterokedastisitas	Data tidak terjadi heterokedastisitas
Uji Autokorelasi	Data bebas dari autokorelasi

Sumber : data diolah, 2019

Langkah berikutnya melakukan uji hipotesis untuk masing-masing variabel dapat terlihat di Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Uji Hipotesis

Model	<i>Unstandardized Coefficient</i>	t	sig	Kes
constant	20.04	152.57	0.00	
PL	0.36	2.81	0.005	diterima
CG	0.19	0.85	0.4	ditolak

Sumber: data diolah, 2019

Tabel 4, memperlihatkan bahwasanya variabel koneksi politik memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0.005, nilai ini lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *fee audit*. Ini menandakan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik membayar lebih tinggi biaya audit dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terhubung secara politik, karena risiko kegagalan dan risiko audit yang dihadapi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik sehingga memicu *fee audit* yang lebih tinggi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan penelitian yang dilakukan Primasari dan Sudarsono dan Ariningrum dan Diyanti bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *fee audit*. Pada sebuah riset ditemukan bahwa auditor bereaksi terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik pada situasi ekonomi makro yang berbeda [37]. Pada riset ini menemukan bahwa auditor memberikan beban *fee audit* yang lebih tinggi bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan koneksi politik adalah memiliki *cost of equity* yang lebih rendah dibanding perusahaan tanpa koneksi politik [38]. Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang *risk taker*, karena risiko yang ditanggung oleh auditor tinggi berdampak pada *fee audit* yang harus dibayar sesuai dengan risiko yang nanti akan diterima. Teori agensi dianggap dapat menjabarkan konflik antara manajemen dengan pemegang saham pada perusahaan yang memiliki koneksi politik melalui dewan direksi serta dewan komisaris. Penelitian Habib dkk (2017), menunjukkan hasil perusahaan yang terdapat CEO yang memiliki koneksi dengan politik mendapatkan kinerja lebih rendah 37% jika dibanding dengan perusahaan yang tidak terkoneksi dengan politik apabila dilakukan pengukuran menggunakan *stock return* selama 3 (tiga) tahun setelah IPO.

Untuk pengujian statistik pada variabel *gender* CEO dari Tabel 4 memperlihatkan hasil tidak signifikan dengan nilai 0.4 lebih besar dibandingkan 0.05 berarti *Gender* CEO tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Hasil ini menunjukkan bahwa *gender* CEO perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap besaran *fee audit*. Ini menegaskan bahwa perusahaan yang dipimpin laki-laki maupun perempuan tidak akan berpengaruh terhadap besaran biaya audit yang dikenakan kepada perusahaan tersebut. Akan tetapi kehadiran perempuan di jajaran direksi

sebagai pimpinan perusahaan di Indonesia sangat kecil kisaran 6% (www.worldbank.org). Hasil ini didukung oleh temuan peneliti bahwa dari total 865 sampel perusahaan hanya 325 perusahaan yang direksinya perempuan, sedangkan sisanya 540 direksinya laki-laki. Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan auditor tidak terlalu memperhatikan risiko yang melekat pada direksi perempuan, sehingga tidak mempengaruhi besaran *fee* audit jika perusahaan dipimpin oleh direksi perempuan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu Xiang [16] dan Bosma [17] yang membuktikan bahwa keberadaan *Gender* CEO dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee audit* yang harus dikeluarkan perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pernah dipimpin oleh CEO perempuan memiliki beban biaya audit yang sama dengan biaya audit yang dikeluarkan saat perusahaan dipimpin oleh CEO laki-laki. Sementara penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Huang dkk. [15] dan Harjoto dkk. [14] yang berhasil membuktikan bahwa perusahaan dengan CEO perempuan berpengaruh signifikan terhadap *fee audit*, artinya bahwa perbedaan *gender* pada perusahaan baik yang dipimpin oleh laki-laki maupun perempuan tidak berpengaruh terhadap besar atau kecil nilai biaya audit yang dikenakan pada perusahaan oleh auditor

5. Kesimpulan

Hasil pengujian dan analisis memperlihatkan bahwasanya koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit. Hasil pengujian untuk variabel koneksi politik memperlihatkan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik mengeluarkan *fee audit* yang lebih besar dibandingkan yang tidak terdapat koneksi politik, karena perusahaan dianggap *risk taker*. *Gender* CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang dipimpin oleh perempuan besaran *fee* audit yang dibayarkan sama atau setara dengan laki-laki yang menjadi pemimpin pada perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya pengungkapan *fee* audit dalam *annual report* masih bersifat *voluntary*, sehingga masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan variabel independen lain yang masih jarang diteliti seperti etnisitas dan diversitas *gender* dalam jajaran Direksi dan Komite Audit, karena hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa *Gender* CEO tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.

Daftar Pustaka

- [1] Ruchmawati, J. Morasa, and M. Y. B. Kalalo, "Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 16, no. 03, pp. 670–679, 2016.
- [2] A. Ardianingsih, "Hubungan Komite Audit dan Kompleksitas Usaha dengan Audit Fee," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 20–28, 2013.
- [3] N. Yulianti, H. Agustin, and S. Taqwa, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Audit, Risiko Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap Fee Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2014 – 2017)," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 217–235, 2019.
- [4] W. S. Yulio, "Pengaruh Konvergensi IFRS, Komite Audit, dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit," *J. Akunt. Bisnis*, vol. XV, no. 29, pp. 31–48, 2016.
- [5] W. A. Subari, "Kualitas Akuntan Publik Masih Belum Memadai," *mediaindonesia.com*, 2016. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/38995/kualitas-akuntan-publik-masih-belum-memadai>. [Accessed: 04-Apr-2021].
- [6] A. Al Ghosh and C. Y. Tang, "Assessing financial reporting quality of family firms: The auditors' perspective," *J. Account. Econ.*, vol. 60, no. 1, pp. 95–116, 2015.

- [7] I. Ariningrum and V. Diyanty, "The impact of political connections and the effectiveness of board of commissioner and audit committees on audit fees," *Australas. Accounting, Bus. Financ. J.*, vol. 11, no. 4, pp. 53–70, 2017.
- [8] T. M. Tuanakotta, *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [9] H. Hendi and Y. Yulinar, "Berapa Besar Biaya Audit? Ditinjau Dari Koneksi Politik Dan Tata Kelola," *Glob. Financ. Account. J.*, vol. I, no. 1, pp. 117–129, 2017.
- [10] R. Fisman, "Estimating the Value of Political Connections," *Am. Econ. Rev.*, vol. 91, no. 4, p. 121, 2001.
- [11] A. P. N. Wicaksono, "Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia," *Akuntabilitas*, vol. 10, no. 1, pp. 167–180, 2017.
- [12] R. Primasari and S. Sudarno, "Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Audit Fee," *Diponegoro J. Account.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–15, 2013.
- [13] Tribunnews.com, "Wanita Indonesia yang Menahkodai Perusahaan Melonjak Drastis," *tribunnews.com*, 2017. [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/04/13/wanita-indonesia-yang-menahkodai-perusahaan-melonjak-drastis>. [Accessed: 04-Apr-2021].
- [14] M. Agus Harjoto, I. Laksana, and R. Lee, "The impact of demographic characteristics of CEOs and directors on audit fees and audit delay Maretno," *Manag. Audit. J.*, vol. 30, no. 8/9, pp. 963–997, 2015.
- [15] T. C. Huang, H. W. Huang, and C. C. Lee, "Corporate executive's gender and audit fees," *Manag. Audit. J.*, vol. 29, no. 6, pp. 527–547, 2014.
- [16] R. Xiang, M. Qin, and C. A. Peterson, "Gender Diversity of Audit Committees and Audit Fees: Evidence from Chinese Listed Companies," *Asian J. Financ. Account.*, vol. 7, no. 2, p. 239, 2015.
- [17] J. Bosma, "The Impact of The CEO Gender on The Level of The Audit Fees," no. June, 2017.
- [18] F. A. Gul, "Auditors' response to political connections and cronyism in Malaysia," *J. Account. Res.*, vol. 44, no. 5, pp. 931–963, 2006.
- [19] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976.
- [20] A. A. Alchian and H. Demsetz, "Production, Information Costs, and Economic Organization," *Am. Econ. Rev.*, vol. 62, no. 5, pp. 777–795, 1972.
- [21] K. M. Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment and Review," *Acad. Manag. Rev.*, vol. 14, no. 1, pp. 57–74, 1989.
- [22] D. Kurniawansyah, S. Kurnianto, and F. A. Rizq, "Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi ; Pendekatan Positivist Dan Principle-Agen," *J. Ris. Akunt. Dan Bisnis*

- Airlangga*, vol. 3, no. 2, pp. 435–446, 2018.
- [23] S. E. N. Pradana and A. Purwanto, “Faktor- Faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Diponegoro J. Account.*, vol. 5, no. 3, pp. 22–32, 2016.
- [24] P. Hribar, T. Kravet, and R. Wilson, “A New Measure of Accounting Quality,” *Rev. Account. Stud.*, vol. 19, no. 1, pp. 506–538, 2014.
- [25] E. A. A. Wahab, M. M. Zain, and K. James, “Political connections, corporate governance and audit fees in Malaysia,” *Manag. Audit. J.*, vol. 26, no. 5, pp. 393–418, 2011.
- [26] J. P. H. Fan, T. J. Wong, and T. Zhang, “Politically connected CEOs, corporate governance, and Post-IPO performance of China’s newly partially privatized firms,” *J. financ. econ.*, vol. 84, no. 2, pp. 330–357, 2007.
- [27] E. Peni and S. Vähämaa, “Female executives and earnings management,” *Manag. Financ.*, vol. 36, no. 7, pp. 629–645, 2010.
- [28] F. Lakhali, A. Aguir, N. Lakhali, and A. Malek, “Do women on boards and in top management reduce earnings management? Evidence in France,” *J. Appl. Bus. Res.*, vol. 31, no. 3, pp. 1107–1118, 2015.
- [29] M. Faccio, M. T. Marchica, and R. Mura, “CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation,” *J. Corp. Financ.*, vol. 39, pp. 193–209, 2016.
- [30] R. B. Adams and D. Ferreira, “Women in the boardroom and their impact on governance and performance,” *J. financ. econ.*, vol. 94, no. 2, pp. 291–309, 2009.
- [31] C. A. Aluy, J. E. Tulung, and H. H. Tasik, “Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Manajemen Puncak dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia),” *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 821–828, 2017.
- [32] M. Kasiram, *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- [33] A. D. Yandari and E. Sudaryati, “How Decision Making To the Audit Fee , Audit,” *J. Akunt. Univ. Jember*, vol. 15, no. 2, pp. 45–51, 2017.
- [34] R. Tehupuring and E. Rossa, “Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penhindaran Pajak di Lembaga Perbankan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia,” in *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 2016, pp. 366–376.
- [35] A. Habib, A. H. Muhammadi, and H. Jiang, “Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia,” *Int. J. Account.*, vol. 52, no. 1, pp. 45–63, 2017.
- [36] P. Caplan, *The Cultural Construction of Sexuality*. London: Routledge, 1987.
- [37] F. A. Gul, “Auditors’ Response to Political Connections and Cronyism in Malaysia,” *J. Account. Res.*, vol. 44, no. 5, pp. 931–963, Dec. 2006.
- [38] N. Boubakri, O. Guedhami, D. R. Mishra, and W. Saffar, “Political Connections and the Cost of Equity Capital,” *J. Corp. Financ.*, vol. 18, no. 3, pp. 541–559, 2012.